

# ISLAM

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Moechtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk. keempat, PT Alumni, Bandung, 2016.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ctk. ketujuh belas, Bina Akasara, Jakarta, 1992.
- Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ctk. pertama, Efata Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Wasingtu Zakiyah, *Panduan Eksaminasi Publik*, ctk. kesatu, ICW Jakarta, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok, 2006.
- Hernol Ferry Markawimbang, *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ridwan K, M Arif S, dan Ariyanto, *Business Judgement Rule Dalam Kasus PT Pertamina Hulu Energi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2023.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Asep N. Mulyana, *Business Judgement Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, Grasindo, Jakarta, 2018

- Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Marpaung, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Prinst D, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press)
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2019

#### **B. Jurnal :**

- Ridwan Khairandy, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009
- Inda Rahadiyan, “Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam kaitannya dengan pemisahan keuangan negara pada permodalan BUMN”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013
- Seni Sri Damayanti, “Kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya dengan Keuangan Negara”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol.6, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
- Njatriani, “*Hubungan hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No. 3 Vol.6, 2019
- Tegar Rusdianta, “*Pandangan Hukum Pidana Terkait Kasus Anak Perusahaan BUMN Terseret Kasus Korupsi*”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2018
- Cecep Dudi Muklis, “*Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik dalam Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Konstituen*, Edisi No. 1 Vol. 3, Pengadilan Tinggi Gorontalo, Februari 2021
- Alfina Rahmatun Nida, “*Analisi Kredit Macet dan Penanganannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Emmanuel Kevin, “*Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara Beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya*”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol.15, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, 2024
- Simatupang, Dian Puji N. “*Teori Pergantian dan PP Nomor 72 Tahun 2016*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022

**C. Makalah :**

Arifin P. Soeria Atmadja, Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum, makalah pada rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 10 Juni 2004

**D. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara  
Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2006  
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  
Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001  
Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 Tentang BADAN USAHA MILIK NEGARA

**E. Putusan Pengadilan :**

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BDG.  
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 21/TIPIKOR/2019/PT.BDG.  
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1399 K/ PID.SUS/2020.  
Putusan PK Mahkamah Agung Nomor : 314 PK/PID.SUS/2023.  
Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/U/20/VIII/2006  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Press/XVII/2019  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011  
Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013  
Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013

Putusan MK Nomor 32/PUU-XVII/2009

**F. Sumber Lain :**

Abdullah, *Mahkamah Agung Judex Juris Ataukah Judex Factie*, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010.

<https://www.bankbjb.co.id/page/profil-bank-bjb>, diakses terakhir tanggal 10 Januari 2025

<https://www.bjbsyariah.co.id/profil>, diakses terakhir tanggal 10 Januari 2025

Dian Puji N. Simatupang, Diskursus Anak Perusahaan BUMN, <https://law.ui.ac.id/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-puji-n-simatupang/>, diakses pada 13 Januari 2025

W. Riawan Tjandra, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Wirawan-Tjandra-Aspek-Hukum-Administrasi-Negara-dalam-Pembentukan-Holding-BUMN.pdf>, diakses pada 13 Januari 2025

